

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA  
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

MUHAMMAD NOVA PERMANA PUTRA  
NPP. 29.0827

*Asdaf Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [mnovapp@gmail.com](mailto:mnovapp@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The implementation of restrictions on community activities is one of the government's policies in preventing, controlling, and stopping the increasing spread of Covid-19 in Indonesia. The Covid-19 pandemic has spread rapidly to various countries around the world and has caused the organization of people's lives in various aspects to become increasingly difficult. The government continues to strive to cope with the spread of Covid-19 by taking various preventive measures to the smallest community scope.* **Purpose:** *This study aims to determine the effectiveness of policies to impose restrictions on community activities in preventing and controlling the spread of Covid-19 in Semarang City, inhibiting factors, and efforts to overcome these obstacles.* **Method:** *The method that researchers use is descriptive qualitative method with inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation techniques, interviews, and documentation. Informants were determined by purposive sampling and snowball sampling techniques. Then in conducting data analysis researchers use data reduction techniques, presentation and conclusion.* **Result:** *Based on the results of research conducted by researchers in research at the Municipal Police Semarang showed that the policy of imposing restrictions on community activities has been effective in controlling the spread of Covid-19 in Semarang City.* **Conclusion:** *Factors that hinder the effectiveness of the implementation of restrictions on community activities is the lack of community compliance, lack of tracer personnel, and uneven distribution of vaccines. Efforts were made to overcome obstacles in the form of socialization and education to the public, digitization of the vaccination system as well as the addition and training of tracer personnel.*

**Keywords:** *Covid-19, Effectiveness, Restrictions On Community Activities*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mencegah, mengendalikan, serta memutus penyebaran *Covid-19* yang semakin meningkat di Indonesia. Pandemi *Covid-19* telah menyebar secara cepat ke berbagai negara di penjuru dunia dan mengakibatkan penyelenggaraan kehidupan masyarakat di berbagai aspek menjadi semakin sulit. Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan hingga lingkup masyarakat terkecil. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19* di Kota Semarang, faktor penghambat, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kemudian dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian di Satpol PP Kota Semarang menunjukkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat telah efektif dalam mengendalikan penyebaran *Covid-19* di Kota Semarang. **Kesimpulan:** Faktor yang menjadi penghambat efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini adalah kurangnya kepatuhan masyarakat, kurangnya tenaga *tracer*, serta distribusi vaksin yang belum merata. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan berupa pengintensifan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, digitalisasi sistem vaksinasi serta penambahan dan pelatihan tenaga *tracer*.

**Kata Kunci :** Covid-19, Efektivitas, Pembatasan Kegiatan Masyarakat

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, seluruh Negara di dunia digemparkan dengan kemunculan pandemi dahsyat bernama *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Virus SARS-Cov-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 bertempat di pasar basah di Kota Wuhan. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah kasus Covid-19 meningkat dengan pesat dan terjadi penyebaran ke berbagai Negara. Sampai dengan bulan Juni 2021, Virus SARS-Cov-2 telah menyebar ke seluruh dunia, dilaporkan kasus terkonfirmasi 178 juta dengan 3,9 juta kasus kematian.

Pandemi Covid-19 untuk pertama kalinya mulai ditemukan di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 setelah Pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19. Berbagai aspek kehidupan mengalami kendala dan penurunan secara drastis, tidak terkecuali aspek ekonomi dan pariwisata. Menanggapi kondisi yang semakin memburuk, Pemerintah kemudian melakukan tindakan untuk melawan penyebaran dan untuk menekan angka virus Covid-19 semakin meluas



dengan mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus Covid-19.

Pada awal bulan April 2020, Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Tercatat penurunan kasus aktif semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar diberbagai daerah dengan angka positif Covid-19 yang tinggi. Salah satu contohnya yaitu di DKI Jakarta. Kasus positif menurun sebesar 55,5% dalam kurun waktu 14 hari yaitu 12.481 pada 24 Oktober 2020 menjadi 8.026 pada 7 November 2020. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penularan virus Covid-19 masih ada namun melambat selama diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pada pertengahan tahun 2021, angka kasus positif Covid-19 kembali meningkat, bahkan ditemukan beberapa varian baru seperti *Alpha*, *Beta*, dan *Delta*. Namun diantara ketiga virus baru tersebut varian *Delta* yang menyumbang kasus terbanyak dalam kenaikan kasus Covid-19 kembali dan dapat menular lebih cepat dari virus yang sebelumnya. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk membendung kasus positif Covid-19 terus bertambah dengan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021 di berbagai Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu Provinsi dengan angka kasus harian Covid-19 tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 28 Juli 2021, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-empat dengan jumlah kasus positif baru 4.666 kasus dan jumlah kasus meninggal sebanyak 398 kasus. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah 13 daerah diantaranya termasuk kedalam asesmen level 4 dan 22 daerah lainnya masuk asesmen level 3. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengintruksikan kepada seluruh Kepala Daerah agar mematuhi kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberlakukan PPKM Darurat sebagai upaya pengetatan untuk menekan laju penyebaran Covid -19 di Jawa Tengah. Kota Semarang termasuk salah satu kota yang terkena kebijakan PPKM karena kasus positif Covid-19 di Kota Semarang sangat tinggi dan masuk dalam zona merah.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Selama beberapa hari kebijakan PPKM Darurat diberlakukan tercatat ada sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pelanggaran tersebut berada di sektor area publik dan pertokoan. Sebanyak dua perusahaan yang terletak di kawasan industri Candi Gatot Subroto, Ngaliyan, Kota Semarang disegel polisi. Perusahaan tersebut tidak mengindahkan imbauan Pemerintah dengan tetap mempekerjakan 50 persen dari kapasitas ruangan. Selain itu juga terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang tetap menyediakan layanan makan dan minum di tempat. Sebanyak 11 lapak milik pedagang kaki lima (PKL) yang berada di jalan Arteri Utara dibongkar oleh petugas Satpol-PP Kota Semarang.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P berjudul Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar (2020). Penelitian ini menemukan bahwa aturan pengetatan aktivitas masyarakat di Kota Denpasar diantara yaitu larangan berkerumun di tempat umum, larangan keluar rumah tanpa memakai masker, dan pembatasan waktu operasional kegiatan usaha. Penelitian Rindam Nasruddin dan Islamul Haq berjudul Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2020). Penelitian ini menemukan bahwa Kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat khususnya kelas bawah setelah diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Penelitian Ertien Rining Nawangsari, Ardha Wildan Rahmadani, Nosa Yudha Firmanyah, dan Yovi Arif Zachary berjudul Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang (2021). Penelitian ini menemukan bahwa Keterlibatan masyarakat Kelurahan Jelakombo dalam upaya menutup rantai penyebaran Covid-19. Hal tersebut berdampak pada angka positif Covid-19 yang berjumlah 27 kasus saja dalam kurun waktu satu tahun. Penelitian Diki Suherman berjudul Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia (2020). Penelitian ini menemukan bahwa Peran Aktor Kebijakan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kebijakan ini dapat berjalan dengan baik apabila 5 unsur pemangku kepentingan berikut ini dapat berpartisipasi dengan baik, yaitu akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah, dan media. Penelitian Hendra Wijayanto berjudul Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19 (2020). Penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai belum efektif dilihat dari jumlah kasus Covid-19 yang masih meningkat. Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum berjalan dengan baik.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Fokus penelitian pada beberapa penelitian di atas menitikberatkan pada bagaimana pembatasan kegiatan masyarakat dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah serta peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Sementara fokus penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas kebijakan PPKM dalam menekan serta mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Kota Semarang.



### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Semarang. Selain itu tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang bersama Satpol PP Kota Semarang dalam meningkatkan efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menggambarkan keadaan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif ini Neuman menjelaskan bahwa peneliti sebagai instrument kunci mengumpulkan data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan dengan memanfaatkan kata-kata atau angka dan untuk menampilkan suatu figur, kategori, atau ilustrasi untuk merespons pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang diamati dalam melakukan penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Kabid Pembinaan Masyarakat, Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Satgas Covid-19 Kota Semarang sejumlah 3 orang dan Masyarakat Kota Semarang sebanyak 5 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas yang digagas oleh Duncan dalam Steers (2005) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi pencapaian tujuan yang terdiri dari indikator tujuan konkrit, kurun waktu, dan dasar hukum. Selanjutnya dimensi integrasi yang terdiri dari indikator sosialisasi dan prosedur. Kemudian dimensi adaptasi yang terdiri dari indikator peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menganalisis Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Semarang ini penulis menggunakan teori Duncan dalam Steers yang menyatakan bahwa efektivitas dapat terjadi pada tiga tahap yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi sebagaimana akan penulis uraikan sebagai berikut :

### **3.1 Pencapaian Tujuan**

Secara umum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan suatu kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka untuk menekan laju penyebaran dan penularan virus Covid-19 serta untuk mengendalikan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit supaya tidak terjadi lonjakan pasien Covid-19 yang melebihi kapasitas rumah sakit. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yakni pembatasan aktivitas penduduk dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat indikasi infeksi penyakit guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penerapan kebijakan PPKM ini adalah untuk mencegah dan mengendalikan angka kasus covid. Dengan menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini memiliki dampak yang cukup besar pada penurunan kasus covid di Kota Semarang. Tingkat Keterisian tempat tidur di rumah sakit berkurang jauh sejalan dengan level PPKM yang semula berada di level 4 dapat ditekan menjadi level 1. Hal tersebut berdampak positif pada sektor ekonomi yang perlahan mulai diberikan kelonggaran untuk beroperasi kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan menaati jam operasional yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

### **3.2 Integrasi**

Integrasi merupakan tolak ukur kemampuan baik itu instansi maupun pihak-pihak terkait dalam memberikan sosialisasi dan dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan suatu kebijakan baru yang merupakan langkah Pemerintah dalam menangani penularan dan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PPKM mulai diberlakukan pada awal tahun 2021 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kegiatan sosialisasi diperlukan untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang terkandung di dalam kebijakan dan bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara prosedur pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM ini telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Covid-19 di Kota Semarang. Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dijadikan sebagai suatu pedoman bagi Satpol PP sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran dilihat dari unsur pimpinan, satgas covid-19 maupun masyarakat telah memperoleh informasi dan mengetahui mengenai hal-hal yang dibatasi dan bagaimana pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada masa pandemi covid-19 ini. Kemudian mengenai



prosedur yang berkaitan dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat telah diatur dengan jelas di Peraturan Walikota Semarang. Peran pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dalam hal ini Kebijakan PPKM dalam memberi tindakan dan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat dan kedapatan melanggar protokol kesehatan pada saat berada di area publik sebelumnya juga telah diberi instruksi mengenai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Demikian pula dengan prosedur yang diterapkan dalam mengendarai transportasi umum berbasis online lebih diperketat dengan menyesuaikan batasan-batasan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pembatasan kegiatan masyarakat.

### **3.3 Adaptasi**

Adaptasi merupakan kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam menaati peraturan dan mematuhi protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru sehari-hari pada masa pandemi covid-19. Kemampuan adaptasi dari seluruh elemen masyarakat dilihat dari dua faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Perubahan gaya hidup masyarakat pada masa pandemi ini dari yang semula hidup bebas dan tidak terlalu memperhatikan kebersihan dan kesehatan mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi kembali. Pemahaman masyarakat terhadap pola hidup baru pada masa pandemi didapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah Kota Semarang. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM ini memerlukan sarana prasarana yang mendukung agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik. Sarana prasarana utama yang dibutuhkan oleh Satgas Covid-19 maupun masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan pada aktivitas sehari-hari adalah tempat cuci tangan yang disediakan di area publik.

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa banyak kebiasaan masyarakat yang dituntut untuk berubah menyesuaikan situasi dan kondisi pada masa pandemi covid-19 ini. Perlahan tapi pasti masyarakat Kota Semarang perlu menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun mereka berada utamanya saat berada di luar rumah dan di tempat umum. Hal tersebut wajib dijadikan sebagai suatu kebiasaan baik yang membudaya dan harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Kota Semarang. Kemudian sarana prasarana yang diperlukan dalam penerapan protokol kesehatan pada umumnya yaitu tempat cuci tangan dan alat cek suhu yang wajib disediakan di setiap tempat-tempat umum. Pada fasilitas umum tertentu seperti kolam renang maka sarana prasarana untuk menunjang protokol kesehatan bagi masyarakat akan lebih beragam disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di tempat tersebut. Secara umum sarana dan prasarana yang menjadi penunjang penerapan protokol kesehatan pada masa pembatasan kegiatan masyarakat ini sudah memadai. Namun demikian diperlukan penambahan persediaan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19.

### 3.4 Faktor Penghambat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan suatu strategi kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Semarang dalam menanggapi permasalahan global yang mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat di dunia khususnya di Indonesia. Kebijakan PPKM dipilih untuk menekan laju penyebaran Covid-19 serta mengendalikan jumlah pasien Covid-19 yang memerlukan penanganan di rumah sakit supaya tidak terjadi *over capacity*. Namun, pada pelaksanaannya di lapangan masih didapatkan faktor-faktor yang menghambat penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Berikut ini faktor-faktor penghambat efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat :

#### 1) Kurangnya Kepatuhan Masyarakat

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang mengalami penurunan berbanding lurus dengan sulitnya mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat sangat bergantung pada persepsi yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kesadaran diri pada tiap individu masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar rantai penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas merupakan faktor utama yang perlu ditumbuhkan pada benak pikiran masyarakat. Disamping itu edukasi terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan sangat diperlukan untuk merubah pandangan masyarakat bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya virus Covid-19.

#### 2) Kurangnya jumlah *testing* dan *tracing*

Testing dan tracing merupakan suatu upaya untuk melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang sebelumnya terdapat kontak baik itu kontak erat maupun kontak langsung dengan penderita Covid-19. Masih rendahnya tingkat jumlah testing dan tracing di Kota Semarang menyebabkan Kota Semarang belum bisa menyandang status PPKM Level 1. Hal tersebut terjadi karena terkendala beberapa faktor yaitu masih kurangnya tenaga *tracer* serta kejujuran dan keterbukaan masyarakat terkait dengan keluhan yang dirasakan apabila terpapar Covid-19 maupun kontak fisik dengan pasien penderita Covid-19 selama beberapa hari kebelakang yang masih malu untuk mengakui dan belum sepenuhnya terbuka kepada pihak tenaga kesehatan.

#### 3) Menipisnya ketersediaan vaksin

Vaksin Covid-19 merupakan salah satu pelindung paling efektif yang dapat memberikan perlindungan kepada orang yang telah disuntik dari penyakit atau bahkan kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19. Salah satu manfaat dari vaksinasi Covid-19 adalah tercapainya herd immunity. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar capaian vaksinasi segera tuntas. Akan tetapi, terdapat suatu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota



Semarang dalam upaya untuk mempercepat vaksinasi di Kota Semarang. Kondisi minimnya ketersediaan vaksin tersebut menghambat percepatan vaksinasi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun demikian, pendaftaran vaksinasi tetap disediakan secara *online* oleh Pemerintah Kota Semarang sambil menunggu kiriman stok vaksin baru dari pusat.

### **3.5 Upaya untuk mengatasi Hambatan yang Mempengaruhi Efektivitas PPKM Di Kota Semarang**

Kendala yang menjadi penghambat efektivitas penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Semarang dapat diminimalisir dengan upaya-upaya sebagai berikut:

#### **1) Sosialisasi dan Edukasi**

Pemberian pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan sehingga masyarakat mampu memahami protokol kesehatan serta mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Komunikasi yang baik dibangun bersama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan 5M. Kemudian masyarakat diimbau untuk mematuhi anjuran dan larangan yang diatur dalam kebijakan PPKM.

#### **2) Penambahan dan Pelatihan Tenaga *Tracer***

Upaya dan dukungan dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan menambah dan memberikan pelatihan kepada calon tenaga *tracer* baru pada tingkat puskesmas. Selain melakukan penambahan pada tenaga *tracer* Pemerintah Kota Semarang juga menginstruksikan kepada babinsa, bhabinkamtibmas dan satgas joko tonggo untuk senantiasa berperan aktif dalam membantu pelaksanaan *testing* dan *tracing* hingga di luaran wilayah dengan tingkat penularan yang tinggi.

#### **3) Digitalisasi Sistem Vaksinasi**

Pendistribusian vaksin ke berbagai daerah yang tidak merata salah satu penyebabnya yaitu karena sistem data vaksinasi yang masih lemah. Agar dapat memecahkan permasalahan tersebut maka diperlukan penguatan sistem dalam proses pendistribusian vaksinasi supaya antara Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat saling melakukan pemantauan mengenai berapa jumlah stok akhir vaksin dan kapan stok baru vaksin akan dikirim dari Pemerintah Pusat supaya tidak terjadi kecurigaan satu sama lain akibat dari ketimpangan yang terjadi dalam pendistribusian stok vaksin ke berbagai daerah di Indonesia.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penerapan kebijakan PPKM dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Semarang dapat dikatakan efektif. Sama halnya dengan temuan Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P (2020) bahwa penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari mobilitas masyarakat di tempat umum serta jam operasional toko dan tempat makan yang serba dibatasi yang berdampak positif pada jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit di Kota Semarang yang semakin berkurang. Keterlibatan seluruh unsur subjek sangat membantu pencapaian tujuan penanggulangan Covid-19. Sama halnya dengan temuan Diki Suherman (2020) bahwa peran aktor kebijakan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kebijakan ini dapat berjalan dengan baik apabila 5 unsur pemangku kepentingan berikut ini dapat berpartisipasi dengan baik, yaitu akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah, dan media.

### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan efektif. Namun demikian masih terdapat kekurangan dimana adaptasi masyarakat dan sarana prasarana yang belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan lagi. Guna meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan PPKM, disarankan untuk mengoptimalkan posko PPKM pada tiap-tiap kelurahan agar mempermudah pelayanan terhadap warga baik yang sedang melaksanakan isolasi mandiri maupun yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit dapat berjalan dengan lancar. serta melakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga yang dibutuhkan sebagai petugas *tracer* untuk melakukan *testing* dan *tracing*. Pemerintah setempat juga seyogiannya mampu merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kota Semarang.

### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Mail, Abdul, dkk, 2018, Pengendalian Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode Min-Max Stock di PT. Panca Usaha Palopo Plywood.



Nasruddin, Rindam dan Haq, Islamul, 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Nawangarsi, Ertien Rining dkk, 2021, Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang.

Nizar, Muhamad Rahmat, 2015, Penggunaan Brosur Sebagai Media Iklan Dalam Meningkatkan Penjualan Pada PT A&S Holiday Travel Palembang (Politeknik Negeri Sriwijaya).

Pujaningsih, Ni Nyoman dan Sucitawathi P, I.G.A.AG Dewi, 2020, Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar.

Suherman, Diki, 2020, Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Wijayanto, Hendra, 2020, Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19

Yunus, Nur Rohim dan Rezki, Annissa 2020, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid.

Bbc.com (2021). *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?*. Sabtu, 28 Agustus 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>.

Coronajakarta (2021). *Covid-19 Varian Delta dan Hal-hal yang Harus Kamu perhatikan.* Sabtu, 28 Agustus 2021. <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/covid-19-varian-delta-dan-hal-hal- yang-harus-kamu-perhatikan>.

Kompas.com. (2021). *Aturan lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, berlaku 3-20 Juli 2021.* Minggu, 29 Agustus 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/114000665/aturan-lengkap-ppkm-darurat-jawa-bali-berlaku-3-20-juli-2021?page=all>. Kompas.com. (2021).

*Langgar PPKM Darurat, 2 perusahaan di Semarang disegel polisi.* Minggu, 29 Agustus 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/09/051900578/langgar-ppkm-darurat-2-perusahaan-di-semarang-disegel-polisi?page=all>.

Kompas.com. (2021). *Semua Daerah di Jawa Tengah PPKM Darurat, Ganjar: Jangan Panik.* Senin, 30 Agustus 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/02/052743178/semua-daerah-di-jawa-tengah-ppkm-darurat-ganjar-jangan-panik>.

Merdeka.com (2021). *Selama PSBB Transisi kasus aktif Covid-19 menurun 55,5%.* Sabtu, 28 Agustus 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/selama-psbb-transisi-kasus-aktif-covid-19-menurun-555-persen.html>.

Semarangkota (2021). *Langgar PPKM Darurat, Satpol PP Kota Semarang Bongkar 11 Lapak PKL.* Minggu, 29 Agustus 2021. [https://semarangkota.go.id/p/2677/langgar\\_ppkm\\_darurat\\_satpol\\_pp\\_kot asemarang\\_bongkar\\_11\\_lapak\\_pkl](https://semarangkota.go.id/p/2677/langgar_ppkm_darurat_satpol_pp_kot asemarang_bongkar_11_lapak_pkl).